

BAB III

Partisipasi Masyarakat Menanggulangi Banjir dan Rob di Kawasan Tambakrejo Semarang

3.1 Banjir dan Rob

Fenomena banjir dan rob merupakan fenomena yang sangat krusial dalam proses pembangunan Indonesia saat ini. Fenomena banjir dan rob merupakan fenomena saling terkait antara variabel sosial, alam dan lingkungan. Banjir disebabkan oleh curah hujan, tanah longsor, kualitas saluran air, topografi, dan kualitas daerah aliran sungai (DAS). Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyumbang tragedi banjir di tanah air adalah perilaku/budaya masyarakat yang kurang kondusif yang tercermin dari aktivitas ekonomi, sosial, politik dan seni serta aktivitas berlalulintas, baik di jalan raya maupun di air, yang semuanya itu terkait dengan masalah pentingnya pendidikan lingkungan hidup.

Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal.

1. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam.
2. Peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya.
3. Degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada *catchment area*, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur

sungai dan sebagainya. Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa.

Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana publik yang rusak. Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan.

Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (*structural approach*), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Indonesia. Penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, meskipun kebijakan non fisik --yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat-- dalam penanggulangan banjir sudah dibuat, namun belum diimplementasikan secara baik, bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektifitasnya dipertanyakan. Kebijakan sektoral, sentralistik, dan *top-down* tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi *stakeholder*, terutama masyarakat yang terkena bencana.

Di Kota Semarang Salah satu dari Kecamatan Semarang Utara yang sangat rentan terhadap banjir rob adalah Kelurahan Tambakrejo. Menurut Kodoatie

(2002), Banjir rob terjadi ketika air pasang menggenang akibat adanya kontak antara laut dengan daratan melalui sungai atau saluran yang bermuara ke pantai. Apabila permasalahan banjir rob ini tidak ditangani dapat menimbulkan banyak kerugian yang harus ditanggung masyarakat.

Paradigma penanggulangan bencana banjir rob biasanya hanya memfokuskan kepada aspek teknis, padahal partisipasi dari masyarakat juga diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan banjir rob ini. Di Kelurahan Tambakrejo ini karakteristik masyarakatnya tergolong berpenghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari kondisi permukimannya yang kumuh. Menurut Kusnanto (2011), kondisi ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan kemampuan untuk beradaptasi atau mengatasi masalah, sehingga rendahnya tingkat ekonomi masyarakat tersebut menyebabkan tidak berdayanya masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungannya.

Upaya meningkatkan *power* masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberdayaan. Di Kelurahan Tambakrejo terdapat program untuk pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi penanggulangan banjir rob yang diwadahi oleh PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2003. Dalam lingkup kelurahan, program ini dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Untuk menjalankan berbagai kegiatan pembangunan fisik, sumber dana didapatkan melalui bantuan dana dari Kementrian PU dan swadaya masyarakat dengan proporsi sharing sebesar 70:30 persen. Kegiatan penanggulangan banjir rob yang telah dilakukan diantaranya peninggian jalan, pembuatan talud, dan perbaikan drainase.

Kebanyakan penduduk yang menempati daerah tersebut separuhnya adalah keluarga pendatang, yang bertempat tinggal mulai dari ngekos, ngontrak maupun membuat rumah sendiri. Begitu pula dengan orang asli daerah itu, mereka sudah turun-temurun mengalami rob, akan tetapi mereka memilih bertahan untuk hidup di daerah itu dengan alasan karena sudah nyaman selagi daerah itu masih memungkinkan untuk bertahan hidup.

Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut rata-rata bermata pencaharian sebagai pedagang, mulai pedagang kaki lima, pedagang berkeliling maupun pedagang yang menetap di rumah-rumah warga sendiri. Rata-rata mereka berjualan makanan-makanan (bakso, mie ayam, warteg, dll), dan ada juga yang berjualan sembako dan makanan-makanan ringan. Karena tidak hanya masyarakat sendiri yang membeli, mulai dari mahasiswa, pekerja, dan orang yang melakukan perjalanan., entah perjalanan jarak jauh maupun hanya manpir untuk mengusir dahaga.

Ada juga yang bekerja sebagai nelayan, karena daerah tersebut dekat dengan laut, meskipun sekarang nelayan mulai berkurang di daerah tersebut tapi masih ada yang menjadi nelayan, kebanyakan dari mereka adalah para orang tua. Agak tragis mungkin, di daerah pesisir seperti itu nelayan mulai berkurang, akan tetapi itulah pilihan masyarakat, mereka sudah mengalami modernitas dalam hidup, mungkin yang di anggapnya bekerja sebagai nelayan adalah pekerjaan yang kurang menjanjikan karena ikan yang ada di laut ada dengan musim-musiman.

Kondisi lingkungan yang seperti itu, kumur rob dan banjir menjadi sebuah hal yang biasa bagi warga masyarakat di Kelurahan Karangrejo

Berikut merupakan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis saat melakukan penelitian di Kelurahan Tambakrejo Kec. Gayamsari Semarang dengan narasumber Joko Sumardi yang berprofesi sebagai pekerja Mebel

“Saya sudah tinggal di sini sudah dari tahun 1996, jadi sudah sekitar 22 tahun, apabila banjir atau rob datang yang kami beraktifitas seperti biasa saja karena sudah biasa, kami tetap disini karena dekat dengan tempat kerja dan tidak punya tujuan lain. Untuk menghadapi banjir dan rob yang kami berusaha untuk meninggikan rumah setiap 5 tahun sekali”¹

Wawancara yang dilakukan oleh penulis saat melakukan penelitian di Kelurahan Tambakrejo Kec. Gayamsari Semarang dengan narasumber Nurozi yang berprofesi sebagai Pensiunan PNS :

“ Saya tinggal disini sudah sekitar 41 tahun tepatnya dari tahun 1977, kalau banjir dan rob sih tergantung hujan kalau hujannya 1 sampai 2 hari pasti banjir dan rob, saya betah tinggal disini karena dekat dengan masjid dan sudah nyaman saja. Dulu tahun 90an waktu banjir besar pernah saya harus sampai naik ke atap rumah, tapi rumahnya dulu belum setinggi ini. Jadi tindakan yang saya lakukan meninggikan rumah sampai setinggi sekarang dan total sudah 5 kali rumah ini ditinggikan”²

Wawancara yang dilakukan oleh penulis saat melakukan penelitian di Kelurahan Tambakrejo Kec. Gayamsari Semarang dengan narasumber Sumardi yang berprofesi sebagai Petani dan Buruh :

“Saya tinggal disini sudah 40 tahun lamanya, kalau hujan ya mesti banjir. Saya tidak akan pindah karena sudah lama disini atau sudah betah, tidak ada tujuan lain dan selama masih bisa mencari penghasilan disini ya tidak akan pindah. Paling ya saya mengamankan barang-barang saya supaya tidak rusak terkena banjir dan rob”³

¹ Wawancara dengan bapak Joko Sumardi pengusaha Mebel, tanggal 24 Desember 2018

² Wawancara dengan bapak Nurozi pensiunan PNS, tanggal 24 Desember 2018

³ Wawancara dengan Sumardi petani dan buruh, tanggal 24 Desember 2018

Wawancara yang dilakukan oleh penulis saat melakukan penelitian di Kelurahan Tambakrejo Kec. Gayamsari Semarang dengan narasumber Sumardi yang berprofesi sebagai Petani dan Buruh :

“Saya tinggal disini sudah 40 tahun lamanya, kalau hujan ya mesti banjir. Saya tidak akan pindah karena sudah lama disini atau sudah betah, tidak ada tujuan lain dan selama masih bisa mencari penghasilan disini ya tidak akan pindah. Paling ya saya mengamankan barang-barang saya supaya tidak rusak terkena banjir dan rob”⁴

Wawancara yang dilakukan oleh penulis saat melakukan penelitian di Kelurahan Tambakrejo Kec. Gayamsari Semarang dengan narasumber Nurrohmad yang berprofesi sebagai Petani dan Buruh :

“Saya tinggal disini sudah 20 tahun lamanya, Kalau pas musim penghujan selalu terkena, apalagi kalau sampai hujannya besar. Saya gak mau mas kalau harus pindah dari sini karena dekat dengan tempat kerja. Pokoknya ya saya antisipasi saja supaya gak terkena dampak banjir dan rob ya meninggikan rumah saya. Meninggikan rumah sudah pasti, ini sudah ketiga kalinya rumah ditinggikan. Kalau dulu sebelum ditinggikan harus pindahkan barang barang berharga ketempat yang aman atau lebih tinggi”⁵

Wawancara yang dilakukan oleh penulis saat melakukan penelitian di Kelurahan Tambakrejo Kec. Gayamsari Semarang dengan narasumber Slamet yang berprofesi sebagai Guru :

“Saya tinggal disini sudah 20 tahun lamanya, Kalau pas musim penghujan selalu terkena, apalagi kalau sampai hujannya besar. Saya gak mau mas kalau harus pindah dari sini karena dekat dengan tempat kerja. Pokoknya ya saya antisipasi saja supaya gak terkena dampak banjir dan rob ya meninggikan rumah saya. Meninggikan rumah sudah pasti, ini sudah ketiga kalinya rumah ditinggikan. Kalau dulu sebelum ditinggikan harus pindahkan barang barang berharga ketempat yang aman atau lebih tinggi”⁶

⁴ Wawancara dengan Sumardi petani dan buruh, tanggal 24 Desember 2018

⁵ Wawancara dengan Nurrohmad petani dan buruh, tanggal 24 Desember 2018

⁶ Wawancara dengan Slamet selaku guru, pada tanggal 24 Desember 2018

3.1.1 Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir dan Rob

Kelurahan Tanjung Mas merupakan dataran rendah yang terletak di pesisir pantai dengan karakteristik hidrologi aquiver produktivitas sedang hingga tinggi yang potensial menimbulkan banjir rob. Kondisi banjir rob di kelurahan ini memiliki ketinggian genangan mulai dari 30 cm - 1 m namun secara keseluruhan kelurahan ini terendam banjir rob disemua wilayahnya ketika air pasang. Diperkirakan genangan rob di kelurahan ini bertambah parah karena terjadi amblesan tanah sekitar 13 cm tiap tahunnya dan air pasang yang semakin tinggi debit airnya. Dampak banjir rob dirasakan masyarakat berupa kerugian fisik, sosial, dan ekonomi

Upaya pemerintah menanggapi banjir dan rob sudah dilakukan salah satunya dengan pembebasan lahan untuk waduk Jatibarang. Penanganan banjir dan rob di Kota Semarang diklaim mulai menuai hasil setelah kolam retensi Kali Semarang beroperasi. Salah satu indikatornya, kawasan yang biasanya tergenang banjir dan rob kini sudah bebas genangan, misalnya Semarang Utara, sebagian Semarang Tengah, dan Semarang Timur.

Sesuai dengan Perda Masterplan Drainase, Semarang dibagi menjadi tiga sistem, yakni barat, tengah, timur dan Mangkang. Untuk sistem drainase tengah sudah berjalan baik. Subsistem Banger diharapkan selesai dan bisa dioperasikan. Penanganan banjir dan rob memang harus komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder, utamanya masyarakat.

Masyarakat harus diajak bersama-sama menangani masalah. Caranya, dengan tidak membuang sampah di sungai. Tahun ini, Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran hingga Rp 165 miliar untuk menangani masalah rob dan banjir. Jika dibiarkan, iklim investasi di Kota Semarang akan terganggu. Investor tentu tak mau menanamkan modalnya jika banjir dan rob terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Sampai dengan saat ini Kelurahan Tambakrejo masih terkait dengan genangan banjir dan rob karena musim penghujan genangan tersebut disebabkan belum adanya pompa yang dioperasikan di Sungai Pacar, yakni dari Sungai Tenggang hingga Medoho. Pemerintah saat ini sudah menyediakan pompa namun instalasinya belum ada sehingga dinas terkait perlu segera mengupayakan agar aktifitas warga kembali lancar seperti gambar sebagai berikut :

Sementara itu Kelurahan Tambakrejo berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tutik, Sekretaris Lurah Tambakrejo mengatakan bahwa :

“Kelurahan mendapatkan bantuan dari BPBD sendiri ada bantuan selimut, matras, tenda, dan sembako apabila banjir terjadi. Obat-obatan dari PMI, Puskesmas keliling juga ada. Kelurahan juga ikut serta menggerakkan masyarakat untuk kerjabakti rutin membersihkan sampah di selokan selokan biar tidak menyumbat aliran air, perbaikan jalan. Dan juga setiap bulan sekali dilakukan rapat dikantor kelurahan dengan melibatkan tokoh tokoh masyarakat seperti rt rw karang taruna guna membahas sesuatu masalah, salah satunya banjir rob ini. Penanganan banjir sejauh ini belum optimal namun, InsyaAllah kalau BKT(Banjir Kanal Timur) sudah jadi diharapkan mampu mengurangi volume air sehingga tidak terjadi banjir atau rob lagi”⁷

Pemerintah dalam hal ini Kelurahan Tambakrejo belum bisa menyelesaikan masalah banjir dan rob di Kelurahan Tambakrejo, Berbagai upaya

⁷ Wawancara dengan Bu Tutik pegawai kantor, tanggal 4 Januari 2019

untuk meninggikan talut dan membersihkan sampah di sekolan belum membuahkan hasil, selain memang dana yang terbatas juga partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk mengani banjir dan rob ini Dalam jangka panjang Kelurahan Tambakreji berharap agar BKT atau Banjir Kanal Timur segera selesai pekerjaannya dan segera dioprasionalkan agar tidak terjadi banjir dan rob.

3.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir dan Rob

Partisipasi masyarakat merupakan proses teknis untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat, agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas, dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. *Stakeholder* penanggulangan banjir secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. *beneficiaries*, masyarakat yang mendapat manfaat/dampak secara langsung maupun tidak langsung
2. *intermediaries*, kelompok masyarakat atau perseorangan yang dapat memberi pertimbangan atau fasilitasi dalam penanggulangan banjir, antara lain: konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang SDA.;
3. *decision/ policy makers*, lembaga/institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum, seperti lembaga pemerintahan dan dewan sumberdaya air.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam program-program pemerintah, maka akuntabilitas pemerintah dapat dinilai dari sejauh mana partisipasi masyarakat dan pihak terkait (*stakeholder*) dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat, mulai dari tahap kegiatan pembuatan konsep, konstruksi, operasional pemeliharaan, serta evaluasi dan pengawasan. Penentuan dan pemilahan *stakeholder* dilakukan dengan metode *Stakeholders Analysis* yang terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Identifikasi *stakeholder*;
2. penilaian keter-tarikan *stakeholder* terhadap kegiatan penang-gulangan banjir;
3. Penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan setiap *stakeholder*;
4. Perumusan rencana strategi partisipasi *stakeholder* dala penanggulangan banjir pada setiap fase kegiatan.

Semua proses dilakukan dengan mempromosikan kegiatan pembelajaran dan peningkatan potensi masyarakat, agar secara aktif berpartisipasi, serta menyediakan kesempatan untuk ikut ambil bagian, dan memiliki kewenangan dalam proses peng-ambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan penanggulangan banjir

Dalam kerangka penanggulangan banjir dan Rob di Tambakrejo sebagai dasar dari keseluruhan pemetaan yang akan dilakukan, maka pemetaan diawali dengan pemetaan dasar wilayah dan pemetaan jaringan drainase dan prasarana terkait tata air, serta pemetaan lingkungan Persebaran pintu air dan pompa air menjadi penting dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menyadari di mana

saja letak sarana dan prasarana pengendali banjir, bagaimana kondisinya, apa masalahmasalah yang terjadi. Peta yang dihasilkan bukan hanya menjadi alat diskusi perumusan masalah dan potensi, akan tetapi juga bisa menjadi acuan untuk perencanaan dan monitoring evaluasi.

Kajian akan dibagi ke dalam 3 tahap yaitu : Pemetaan sebaran sarana/prasarana tata air pada setiap RW/dusun dan hasilnya akan digabung menjadi peta sarana prasarana tata air tingkat kelurahan. Pemetaan Wilayah Kelurahan/desa sebagai peta dasar untuk semua kajian pemetaan yang akan dilakukan. Pemetaan permasalahan tata air pada tingkat RW/dusun yang nantinya akan digabung menjadi peta permasalahan tata air pada tingkat kelurahan/desa.

Pemetaan dipakai untuk mendapatkan gambaran dan kondisi sarana dan prasarana tata air di Kelurahan Tambakrejo. Setelah Peta dasar dibuat, kegiatan selanjutnya adalah melakukan orientasi atau survei lapangan untuk mengenal kondisi drainase atau kondisi pengendalian banjir di Kelurahan Tambakrejo dan wilayah sekitarnya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusidiskusi secara informal dengan pihak pemerintah kelurahan, pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dijadikan dasar dalam kegiatan rembug warga

Selain Pemetaan untuk menanggulangi Banjir dan Rob di Kelurahan Tambakrejo yang melibatkan partisipasi masyarakat antara lain melalui :

1. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, Pemerintah berupaya untuk melakukan sosialisasi memberikan pemahaman tentang apa yang akan dilakukan

pemerintah di kawasan mereka dalam rangka penanggulangan rob. Sosialisasi dilakukan pemerintah melalui pemerintah kelurahan. Sosialisasi diberikan manakala pemerintah akan melaksanakan pembangunan di kawasan tersebut. Selain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan, sosialisasi juga berfungsi untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam rangka penanggulangan Rob. Partisipasi masyarakat di Tambakrejo selama ini pada proses perencanaan pembangunan serta aplikasi di lapangan. Pada proses perencanaan, masyarakat ikut bermusyawarah dengan Pemerintah Kota Semarang dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG). Selain perencanaan, masyarakat juga berpartisipasi dalam mengaplikasikan pembangunan pintu-pintu air yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dilibatkannya masyarakat terkena dampak rob dalam penanggulangan rob di Kota Semarang.

2. Aspek Lingkungan

Dalam aspek lingkungan pemerintah berupaya untuk menahan abrasi yang lebih parah dengan menanam mangrove di pesisir pantai Kota Semarang. Pemeliharaan mangrove ini melibatkan LSM lingkungan yang peduli akan lingkungan hidup. Namun sebenarnya fungsi mangrove tidak secara langsung untuk menanggulangi Rob. Namun untuk menahan adanya abrasi di daerah Pantai. Selain itu Kantor Lingkungan Hidup Kota Semarang juga berupaya untuk mengajak masyarakat untuk hidup disiplin dan sehat untuk

ikut berpartisipasi melalui kedisiplinan membuang sampah tidak sembarang karena akan berakibat pada tersumbatnya saluran air.

3. Aspek Hukum

Dalam masalah penanggulangan rob di Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang belum mempunyai regulasi yang berupa Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Semarang menggunakan dokumen perencanaan sebagai output dari perencanaan yang dilakukan dengan para *stakeholder*.

4. Aspek Kelembagaan

pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat perlu melibatkan peran *stakeholder*. Begitu pula dengan penanggulangan rob di Kota Semarang, partisipasi *stakeholder* sangat berpengaruh pada pencapaian hasil usaha penanggulangan rob tersebut. peran masyarakat sangatlah penting, baik dari sisi infrastruktur maupun perilaku. Masyarakat harus menyesuaikan bangunan rumahnya agar ditinggikan supaya tidak tenggelam terkena rob. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang tidak bisa membantu untuk masalah rumah pribadi masyarakat. Dari sisi perilaku, masyarakat harus ikut berpartisipasi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan yang bisa membuat tersumbatnya saluran air.

Secara umum tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan rob selama ini tergolong menengah ke atas. Tingginya partisipasi ini dikarenakan obyek yang dibicarakan merupakan sesuatu yang vital bagi warga, karena menyangkut upaya perbaikan lingkungan dan kelangsungan kehidupannya di masa depan. Sebagian besar Masyarakat tergolong memiliki

tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam proses penetapan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam hal penanggulangan rob.

Tingginya partisipasi responden dalam proses penetapan kebijakan tersebut, dikarenakan responden selaku sasaran program terkena dampak memiliki kepedulian sosial yang tinggi, karena apabila tidak peduli dengan kondisi sekitarnya, dikhawatirkan akan bisa mengganggu kelancaran usaha produksinya sehari-hari, yang umumnya sangat berdekatan dengan alam

. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Tambakrejo dalam proses implementasi ini, dibuktikan dengan tingginya kesediaan warga untuk menghadiri undangan dari kelurahan, tingginya kesediaan untuk membantu, baik dana, tenaga juga konsumsi bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur penanggulangan rob.

Fenomena ini semakin menegaskan bahwa kultur masyarakat pantai yang agraris yang umumnya terbuka, ternyata di sisi lain juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi apabila menyangkut kepentingan dan keberlangsungan kehidupan sehari-harinya, dengan harapan agar masyarakat bisa hidup secara lebih nyaman, aman dan lebih higienis. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses evaluasi dampak kebijakan tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan dengan mayoritas masyarakat sudah sangat memahami lingkungan tempat tinggalnya, maka apabila disuruh melakukan penilaian atau evaluasi atas kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan banjir dan rob

3.2 Analisis Tentang Banjir dan Rob di Desa Tambak Rejo

Banjir rob menurut Kodoatie adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut pasang yang menggenangi daratan. Banjir rob akan semakin parah dengan adanya genangan air hujan (*run off*), dan banjir lokal akibat saluran drainase yang kurang terawat dan kurangnya ruang terbuka hijau.⁸ Penanggulangan banjir menurut terbagi dalam dua tinjauan, yaitu tinjauan aspek teknis dan tinjauan aspek non-teknis. Tinjauan penanggulangan banjir berdasarkan aspek teknis membahas mengenai tiga hal, yakni sungai, system drainase, dan tata guna lahan. Sedangkan yang dibahas dalam tinjauan aspek non-teknis adalah upaya untuk menanggulangi kondisi lingkungan yang terancam disertai upaya peningkatan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam lingkup sosial dan budaya⁹

Melihat dari latar belakangnya, desa Tambakrejo dahulu merupakan sebuah lautan yang kemudian terjadi sedimentasi, sehingga terciptalah daratan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh tempat yang dahulunya lautan dan terjadi sedimentasi adalah naiknya air laut ke permukaan tanah, atau yang biasa kita sebut dengan rob.

Permasalahan tersebut sulit untuk diatasi karena melibatkan beberapa aspek, mulai dari aspek lingkungan hingga aspek kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan. Sekarang ini, berdasarkan dari observasi, masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, aspek yang paling berpengaruh terhadap rob ini adalah aspek lingkungan yang sulit

⁸ Kodoatie, R. J., and Sugiyanto. *BANJIR: Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2012, halaman 54

⁹ Ibid, halaman 54

untuk diatasi oleh karena itu dibutuhkan partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya¹⁰

Saat ini program dari pemerintah hanya mengadakan peninggian jalan untuk mengurangi dampak dari rob ini. Usaha pemerintah untuk menanggulangi Banjir dan Rob di Tambakrejo adalah dengan peninggian jalan. Peninggian jalan menurut dapat mengurangi dampak dari rob namun dapat menyebabkan efek samping bagi rumah warga. Saat ini, masyarakat Tambakrejo seperti harus mempunyai program meninggikan rumah setiap lima tahun, mengikuti tinggi jalan yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Meskipun begitu, masyarakat tetap berkeinginan untuk menetap di lingkungan tersebut, karena mereka sudah merasa nyaman

Oleh karenanya partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk penanggulangan banjir dan rob dengan memahami apasaja yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan banjir dan rob, mengawasi kinerja pemerintah dalam penanggulangan banjir dan juga ikut serta dalam perencanaan, masyarakat

¹⁰ H.A.R. Tilaar. Kekuasaan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan. Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rinika Cipta, 2009 halaman 159

ikut bermusyawarah dengan Pemerintah Kota Semarang dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG), dalam aspek lingkungan masyarakat hidup disiplin dan sehat untuk ikut berpartisipasi melalui kedisiplinan membuang sampah tidak sembarang karena akan berakibat pada tersumbatnya saluran air.

3.3 Partisipasi masyarakat Tambak Rejo dalam penanggulangan banjir

Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan rob selama ini cukup baik seperti yang terjadi di Tambak Rejo. Tingginya partisipasi ini dikarenakan obyek yang dibicarakannya merupakan sesuatu yang vital bagi warga Tambak Rejo, karena menyangkut upaya perbaikan lingkungan dan kelangsungan kehidupannya di masa depan. Sebagian besar Masyarakat tergolong memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam proses penetapan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam hal penanggulangan rob.

Tingginya partisipasi masyarakat Tambak Rejo dalam proses penetapan kebijakan tersebut, dikarenakan responden selaku sasaran program terkena dampak memiliki kepedulian sosial yang tinggi, karena apabila tidak peduli dengan kondisi sekitarnya, dikhawatirkan akan bisa mengganggu kelancaran usaha produksinya sehari-hari, yang umumnya sangat berdekatan dengan alam.

Sebagian besar masyarakat Tambak Rejo memiliki tingkat partisipasi yang sedang dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan rob tergolong, cukup tinggi. Tingginya tingkat partisipasi responden dalam proses implementasi ini, dibuktikan dengan tingginya kesediaan untuk menghadiri undangan

implementasi, tingginya kesediaan untuk membantu, baik dana, tenaga juga konsumsi bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur penanggulangan rob.

Fenomena ini semakin menegaskan bahwa kultur masyarakat pantai yang agraris yang umumnya terbuka, ternyata di sisi lain juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi apabila menyangkut kepentingan dan keberlangsungan kehidupan sehari-harinya, dengan harapan agar masyarakat bisa hidup secara lebih nyaman, aman dan lebih higienis.

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses evaluasi dampak kebijakan tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan dengan mayoritas warga Tambak Rejo sudah sangat memahami lingkungan tempat tinggalnya, maka apabila disuruh melakukan penilaian atau evaluasi atas kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan rob, mayoritas responden mampu merinci dan memverifikasinya secara jelas dan baik.